

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA EPENGANTAR .....                                   | i   |
| DAFTAR ISI .....  | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                      | iii |
| DAFTAR DIAGRAM .....                                    | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                  | 1   |
| 1.1 KONDISI UMUM .....                                  | 1   |
| 1.2 PEMBENTUKAN LEMBAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG.....  | 2   |
| 1.2.1 KEDUDUKAN.....                                    | 2   |
| 1.2.2 MANDAT .....                                      | 2   |
| 1.3 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI.....                    | 4   |
| 1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA .....                         | 4   |
| 1.3.2 STRUKTUR ORGANISASI .....                         | 7   |
| 1.4 ISU YANG BERKEMBANGAN.....                          | 8   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA ..... | 10  |
| 2.1 VISI DAN MISI.....                                  | 10  |
| 2.2 RENSTRA BAWASLU KALTIM 2015 - 2019.....             | 12  |
| 2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019.....                | 13  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                     | 15  |
| 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....                     | 15  |
| 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....         | 15  |
| 3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN.....                     | 32  |
| BAB IV PENUTUP .....                                    | 36  |
| LAMPIRAN  |     |

## DAFTAR TABEL

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.1  | PEGAWAI BERSTATUS PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....                          | 4  |
| 1.2  | PEGAWAI BERSTATUS NON PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPROVINSIKALIMANTANTIMUR .....                        | 5  |
| 2.1  | PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019 .....   | 12 |
| 3.1  | SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019.....   | 15 |
| 3.2  | REKAPITULASIPENANGANAN PELANGGARANBERDASARKAN JENIS PELANGGARAN.....  | 15 |
| 3.3  | DATA STAKEHOLDER 2019 .....   | 19 |
| 3.4  | DATA STAKEHOLDER 2018 .....   | 20 |
| 3.5  | DATA KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU SERENTAK DPR, DPD, DPRD PROV. DPRD KAB/KOTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 KALTIM ..... | 22 |
| 3.6  | REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN DI PROVINSI KALIMANTAN.....  | 23 |
| 3.7  | REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2018.....   | 26 |
| 3.8  | PERSENTASE REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2015 DAN 2018 .....  | 26 |
| 3.9  | LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN .....  | 27 |
| 3.10 | PELANGGARAN PILKADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .....   | 28 |
| 3.11 | PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA .....  | 29 |
| 3.12 | DATA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA .....  | 30 |
| 3.13 | DATA RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA.....   | 31 |
| 3.14 | DATA PENYERAPAN DIPA APBN TA. 2019 .....  | 32 |
| 3.15 | DATA REALISASI KEUANGAN APBN TA. 2019.....  | 33 |

## DAFTAR DIAGRAM

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.1 | PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR<br>BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN ..... | 6  |
| 1.2 | PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN<br>TIMURBERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN .....  | 6  |
| 1.3 | STRUKTUR ORGANISASI .....   | 7  |
| 3.1 | PELANGGARAN ADMINISTRASI TAHUN 2019 .....   | 16 |
| 3.2 | PELANGGARAN ETIK TAHUN 2019.....  | 16 |
| 3.3 | PELANGGARAN PIDANA TAHUN 2019.....  | 17 |
| 3.4 | PELANGGARAN LAINNYA TAHUN 2019 .....  | 17 |
| 3.5 | BUKAN PELANGGARAN/DIHENTIKAN TAHUN 2019 .....   | 17 |
| 3.6 | REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN PADA<br>TAHUN 2019.....                    | 23 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri atau inparsial yang bebas dari pengaruh dari berbagai pihakterkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dibentuk untuk bertugas mengawasi Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta melakukan pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

LAKIP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wujud dan pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi atas pelaksanaan dan fungsinya, serta digunakan sebagai salah satu bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2019.

## 1.2 PEMBENTUKAN LEMBAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi :

### 1.2.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 97, 98, 99 dan 100 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu (Bawaslu dan Bawaslu Provinsi) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### 1.2.2 MANDAT

Pada Pasal 27 Menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  3. Proses dan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  4. Penetapan calon gubernur;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pemilihan gubernur.
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasar jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi

dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pada Pasal 76, Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban sebagai berikut ini:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3 SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi didukung oleh ± 48 Orang Pegawai, baik PNS maupun Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

*Table 1.1*

**Pegawai berstatus PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

| NO | NAMA                          | NIP                        | L/P       | TTL                          | STATUS      | JABATAN              |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------------|
| 1  | H. Budiansyah, S.Pi, M.Si     | NIP. 19701107 200312 1 003 | Laki-Laki | Samarinda, 07 November 1970  | PNS DPK     | Kepala Sekretariat   |
| 2  | Senjaya Ibrata, S.Sos         | NIP. 19711130 200701 1 018 | Laki-Laki | Samarinda, 30 September 1971 | PNS DPK     | Kasubag Administrasi |
| 3  | Jumiati, S.Sos                | NIP. 19671008 199402 2 001 | Perempuan | Samarinda, 08 Oktober 1967   | PNS DPK     | Kasubag TP3          |
| 4  | Lely Febriyanti, S.H          | NIP. 19740211 200701 2 015 | Perempuan | Surabaya, 11 Februari 1974   | PNS DPK     | Kasubag H2AL         |
| 5  | Andreas Kelan                 | NIP. 19670414 199003 1 012 | Laki-Laki | Maumere, 14 April 1967       | PNS DPK     | PPK                  |
| 6  | Heddi Nopriwibowo, A.Md       | NIP. 19821117 201503 1 002 | Laki-Laki | Samarinda, 17 November 1982  | PNS Bawaslu | Staf Perencanaan     |
| 7  | Kiki Mulyana, A.Md            | NIP. 19890717 201503 1 003 | Laki-Laki | Sumedang, 17 Juli 1989       | PNS Bawaslu | Bendahara            |
| 8  | Raden Dion Erik Perdata, A.Md | NIP. 19960810 201902 1 001 | Laki-Laki | Samarinda, 10 Agustus 1996   | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |
| 9  | Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST | NIP. 19950428 201902 2 001 | Perempuan | Semarang, 28 April 1995      | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |
| 10 | Annisa Syafitri Nurdiana, S.H | NIP. 19921209 201902 2 002 | Perempuan | Surakarta, 09 Desember 1992  | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |
| 11 | Agung Apriyadi, S.Kom         | NIP. 19920405 201902 1 001 | Laki-Laki | Tegal, 05 April 1992         | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |
| 12 | Ellsa Maelani Kaninda, S.I.P  | NIP. 19940530 201902 2 003 | Perempuan | Bandung, 30 Mei 1994         | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |
| 13 | Syaugi Pratama, S.H           | NIP. 19900913 201902 1 001 | Laki-Laki | Bekasi, 13 September 1990    | PNS Bawaslu | Staf Pendukung       |

**Table 1.2**

**Pegawai berstatus NON PNS di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**

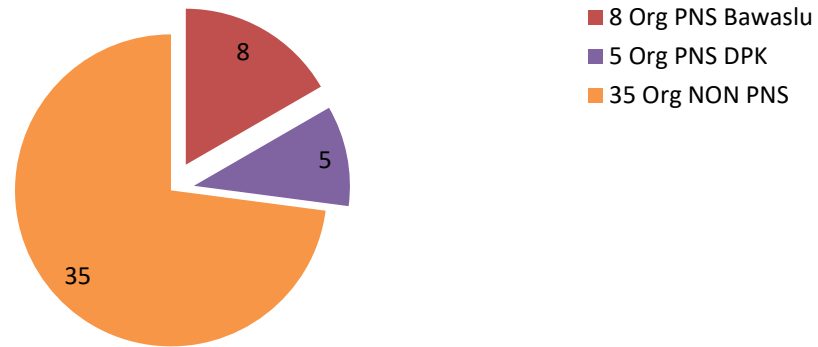
| NO | NAMA                                | L/P       | TTL                            | JABATAN        |
|----|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 1  | Jabaruddin, SH                      | Laki-Laki | Samarinda, 23 September 1972   | Staf Pendukung |
| 2  | Agus Purnomo, S.Sy., M.H            | Laki-Laki | Samboja, 20 Agustus 1989       | Staf Pendukung |
| 3  | Abdillah, S.E                       | Laki-Laki | Ujung Pandang, 14 Agustus 1967 | Staf Pendukung |
| 4  | Ita Yulianti                        | Perempuan | Samarinda, 04 Februari 1981    | Staf Pendukung |
| 5  | Rinda Novia Damayanti, S.E          | Perempuan | Samarinda, 02 November 1981    | Staf Pendukung |
| 6  | Andri Hermawan                      | Laki-Laki | Samarinda, 15 Januari 1986     | Staf Pendukung |
| 7  | Muhammad Jabar, S.IP                | Laki-Laki | Kijang, 17 Januari 1993        | Staf Pendukung |
| 8  | Arofah Azhar, A.Md                  | Laki-Laki | Samarinda, 24 Maret 1989       | Staf Pendukung |
| 9  | Agustinus Seto, S.Kom               | Laki-Laki | Samarinda, 17 Agustus 1990     | Staf Pendukung |
| 10 | Muhammad Iqbal Rachman, S.I.Kom     | Laki-Laki | Samarinda, 19 Oktober 1985     | Staf Pendukung |
| 11 | Dedi Setiawan, S.IP                 | Laki-Laki | Balikpapan, 08 Januari 1990    | Staf Pendukung |
| 12 | Abd Khohar, MT                      | Laki-Laki | Kutai, 07 Juli 1993            | Staf Pendukung |
| 13 | Akhmad Rifani, S.Kom                | Laki-Laki | Tenggarong, 17 Oktober 1991    | Staf Pendukung |
| 14 | Norma Sinta, S.Kom                  | Perempuan | Tarakan, 10 April 1992         | Staf Pendukung |
| 15 | Muhammad Yasin Sidik                | Laki-Laki | Tasikmalaya, 18 Januari 1994   | Staf Pendukung |
| 16 | Vany Lucas, S.H                     | Perempuan | Magetan, 02 Agustus 1992       | Staf Pendukung |
| 17 | Muhammad Maulana Yusuf, S.H         | Laki-Laki | Pasir, 07 April 1996           | Staf Pendukung |
| 18 | Feisal Ashar, S.H                   | Laki-Laki | Samarinda, 04 Oktober 1994     | Staf Pendukung |
| 19 | Dinda Ratu Septiani, S.H            | Perempuan | Samarinda, 16 September 1995   | Staf Pendukung |
| 20 | Ratna Dewi, S.Pd                    | Perempuan | Samarinda, 11 Oktober 1991     | Staf Pendukung |
| 21 | Ferdhika Balfa, S.Kom               | Laki-Laki | Samarinda 12 Agustus 1987      | Staf Pendukung |
| 22 | Muhammad Ripadin, S.Pd              | Laki-Laki | Samarinda, 30 April 1988       | Staf Pendukung |
| 23 | Arrohman Nur, S.K.M                 | Laki-Laki | Balikpapan, 25 Juli 1992       | Staf Pendukung |
| 24 | Amatsyah                            | Laki-Laki | Samarinda, 14 Mei 1971         | Keamanan       |
| 25 | Muhammad Misran Ar                  | Laki-Laki | Anjir, 06 Agustus 1975         | Keamanan       |
| 26 | Rakhmad Hery Saputra                | Laki-Laki | Samarinda, 01 Mei 1989         | Keamanan       |
| 27 | Muhammad Ramli                      | Laki-Laki | Samarinda, 01 Desember 1972    | Pengemudi      |
| 28 | M. Ikhwan Suwarno                   | Laki-Laki | Waru, 22 September 1984        | Pengemudi      |
| 29 | Andri Wahyudi                       | Laki-Laki | Muhuran, 18 Februari 1993      | Pengemudi      |
| 30 | Sukri                               | Laki-Laki | Merang Kayu, 23 Juli 1987      | Pengemudi      |
| 31 | Rendi Raditya Putra                 | Laki-Laki | Balikpapan, 03 Agustus 1991    | Pengemudi      |
| 32 | Haikal Hidayatullah Azhari Marullau | Laki-Laki | Samarinda , 06 Oktober 1988    | Pengemudi      |
| 33 | Sumini                              | Perempuan | Surabaya, 29 September 1971    | Pramusaji / CS |
| 34 | Kosmas Niron Moron                  | Laki-Laki | Malaysia, 30 April 1992        | Pramusaji / CS |
| 35 | Bambang                             | Laki-Laki | Balikpapan, 10 Oktober 1973    | Pramusaji / CS |



Adapun grafik SDM menurut status kepegawaian dan status pendidikan adalah sebagai berikut:

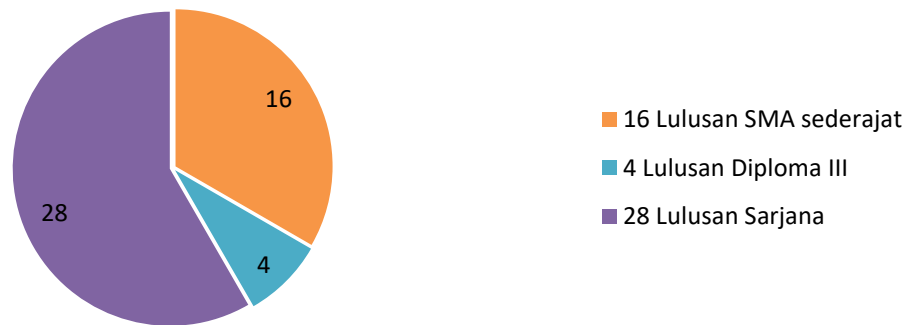
*Diagram1.1*

**Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status kepegawaian**



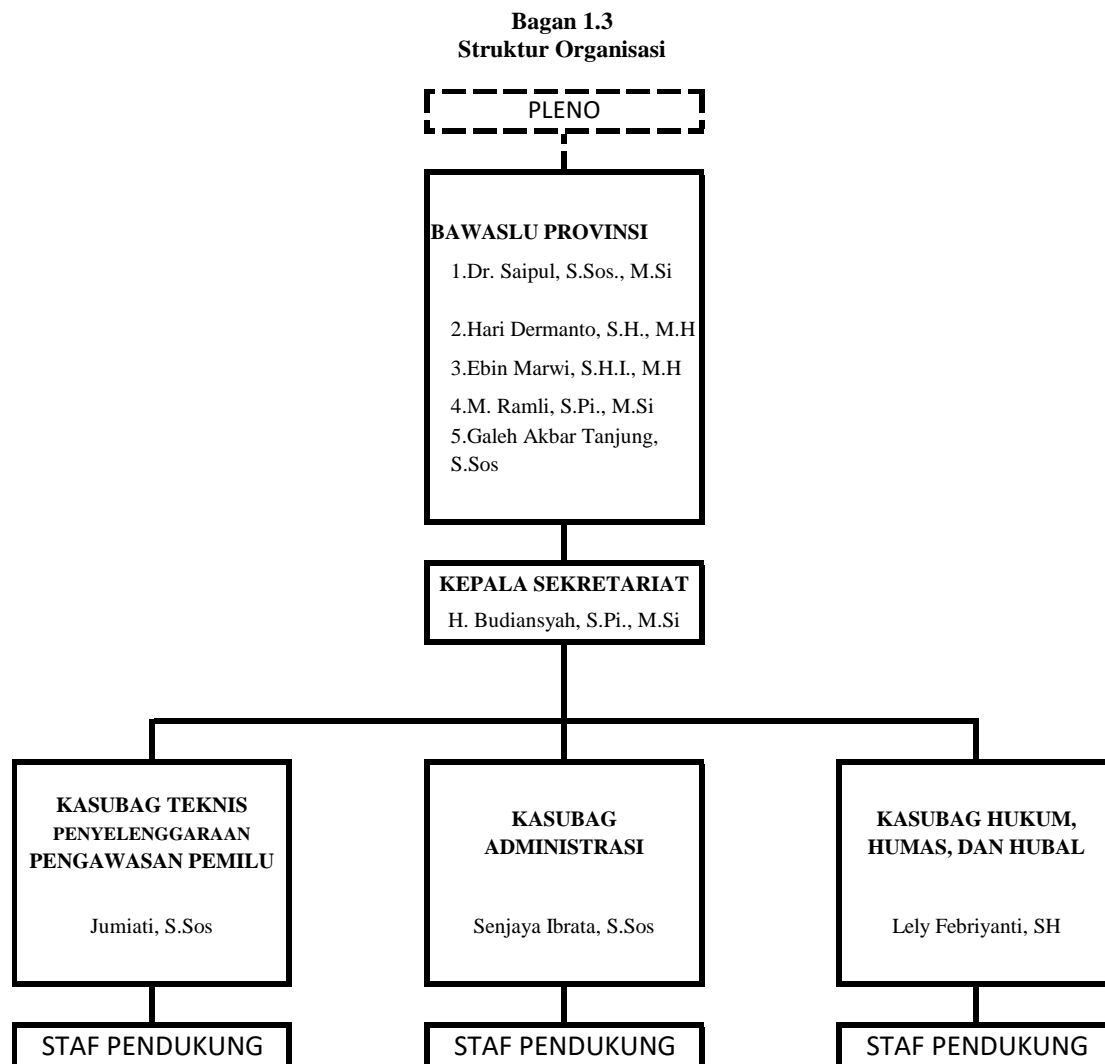
*Diagram 1.2*

**Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenjang pendidikan**



### 1.3.2 Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan, Bawaslu Provinsi memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2013.



Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Bawaslu terdiri dari:

#### 1. Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

## **2. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

## **3. Kasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

### **1.4 ISU YANG BERKEMBANGAN**

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memiliki isu yang berkembang dikaltim, di antaranya adalah:

1. Pasca pencoretan dalam DPT karena berdasarkan putusan Pelanggaran dan Administrasi Perbedaan Penafsiran terkait dengan tahapan penyerahan dukungan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tentang Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
4. Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Tahapan Pemutakhiran data pemilih, masih terdapat masyarakat yang mempunyai hak pilih tapi belum terdaftar dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwaslu Se-Kalimantan Timur memberikan rekomendasi terkait ketidakadaan nama yang bersangkutan kepada PPS ataupun PPK Kecamatan.
6. Kemudian Tahapan Kampanye, masih ada pelanggaran yang sifatnya bisa di selesaikan secara musyawarah misalnya dalam pelaksanaan kampanye dalam hal pemasangan alat peraga kampanye masih adanya alat peraga kampanye yang dipasang di pepohonan

ataupun tiang listrik tindakan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwascam atau PPL menindaklanjuti dengan pendekatan persuasive, bersurat ataupun teguran agar dapat di pindahkan. Jika pendekatan persuasive, surat dan teguran tidak diindahkan maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melalui Panwaslu, Panwascam atau PPL melakukan tindakan langsung berupa penertiban dengan mengambil dan mengamankan Alat peraga tersebut. Dalam melakukan tindakan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah, Satpol PP untuk melakukan penertiban alat peraga tersebut.

7. Menjelang masa tenang ternyata masih adanya alat peraga yang tidak diturunkan atau tidak dibersihkan oleh tim pemenang, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan acuan Surat Edaran Bawaslu RI terkait Patroli Pengawasan melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan satpol PP untuk melakukan penyisiran penertiban alat peraga tersebut.
8. Hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan, di dapatkan bahwa terdapat kendala di sekretariat terkait pembatasan Perjalanan Dinas untuk tiap orang yang di tugaskan dalam melakukan proses pengawasan, sehingga harus melakukan mengganti atau melakukan sift pengawasan.
9. Pasca pencoretan dalam DPT karena berdasarkan putusan Pelanggaran Administrasi

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”***.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu *pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas*. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);
- Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan

penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketiga diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama dan strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu. Peran Bawaslu sebagai “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses

pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain. Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenam Bawaslu sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri negeri maupun pihak dari luar negeri.

## **2.2 RENSTRA BAWASLU 2015 - 2019**

Rencana Strategis Bawaslu 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan yang pada tahun 2016 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2019 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian

- sengketa pemilu serta penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu;
  3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu;
  4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu.

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu 2015-2019 merupakan panduan bagi Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2015-2019 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilu.

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Table 2.1

#### Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Tahun 2019

| No | Sasaran Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 1  | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu | 100%   |
|    |   | Persentase penyediaan dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan      | 100%   |
|    |   | Persentase penyediaan SDM sesuai kompetensi                               | 100%   |



|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
|   |   | Persentase penyediaan SDM sekretariat sesuai kompetensi  |           |
| 2 | Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur | Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggara pemilu | 11 Daerah |
|   |   | Persentase penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan                                 | 100%      |
|   |   | Persentase penyelesaian sengketa pemilu  | 100%      |
| 3 | Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur                                       | Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani   | 100%      |
|   |   | Persentase informasi yang disampingkan sesuai dengan SOP   | 100%      |

Sesuai pada DIPA Petikan tahun Anggaran 2019 Pada awal Tahun Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 134.616.950.000,-. Kemudian pada bulan april ada penambahan dana sebesar Rp 242.550.000,- sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 134.859.500.000,-. Kemudian pada bulan September menjadi Rp 134.467.320.000 dan pada bulan Desember 2018 menjadi Rp 135.915.924.000,-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 pada dasarnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bawaslu tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2019:

Tabel 3.1  
**Sasaran Strategis Tahun 2019**

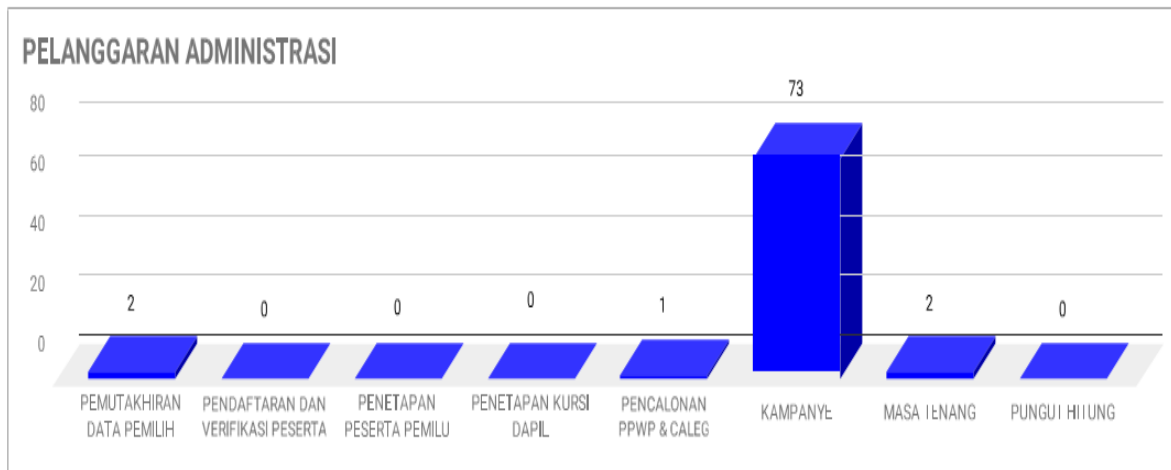
| SASARAN STRATEGIS  | RATA-RATA CAPAIAN 2019 |
|--|------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak | 100 %                  |
| Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Serentak | 100 %                  |
| Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak  | 100 %                  |

**Table 3.2**

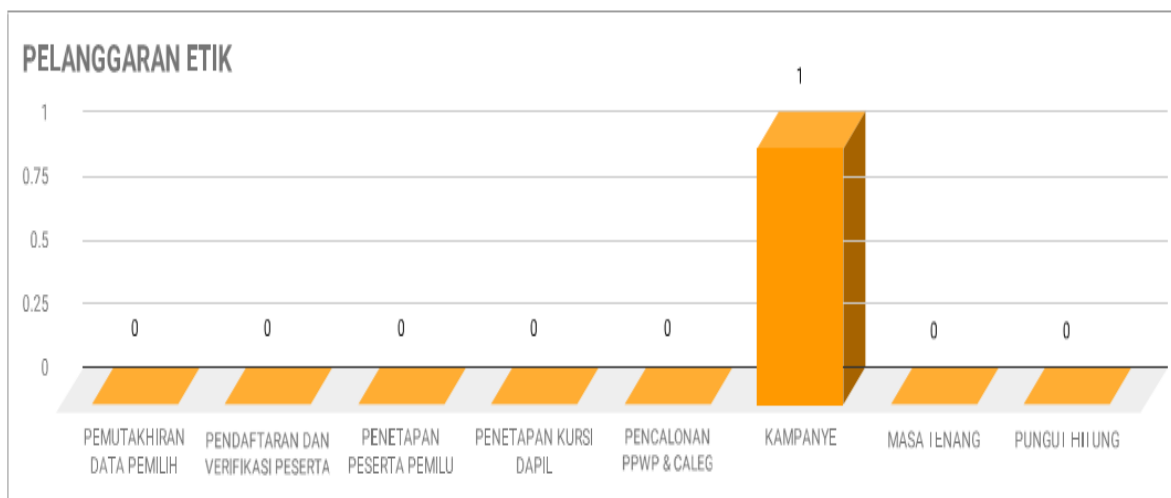
**Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran**

| NO            | JENIS PELANGGARAN              | TERJADI DALAM TAHAPAN        |  |                                |                             |                               |            |                |                  | JML        |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|               |                                | PEMUTAKHIRAN<br>DATA PEMILIH | PENDAFTARAN<br>DAN VERIFIKASI<br>PESERTA | PENETAPAN<br>PESERTA<br>PEMILU | PENETAPAN<br>KURSI<br>DAPIL | PENCALONAN<br>PPWP &<br>CALEG | KAMPANYE   | MASA<br>TENANG | PUNGUT<br>HITUNG |            |
| 1             | ADMINISTRASI                   | 2                            | 0  | 0                              | 0                           | 1                             | 73         | 2              | 0                | 78         |
| 2             | ETIK                           | 0                            | 0  | 0                              | 0                           | 0                             | 1          | 0              | 0                | 1          |
| 3             | PIDANA                         | 0                            | 0  | 0                              | 0                           | 0                             | 2          | 3              | 2                | 7          |
| 4             | LAINNYA                        | 0                            | 0  | 0                              | 0                           | 0                             | 18         | 0              | 0                | 18         |
| 5             | BUKAN PELANGGARAN / DIHENTIKAN | 0                            | 0  | 0                              | 0                           | 0                             | 16         | 0              | 0                | 16         |
| <b>JUMLAH</b> |                                | <b>2</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>1</b>                      | <b>110</b> | <b>5</b>       | <b>2</b>         | <b>120</b> |

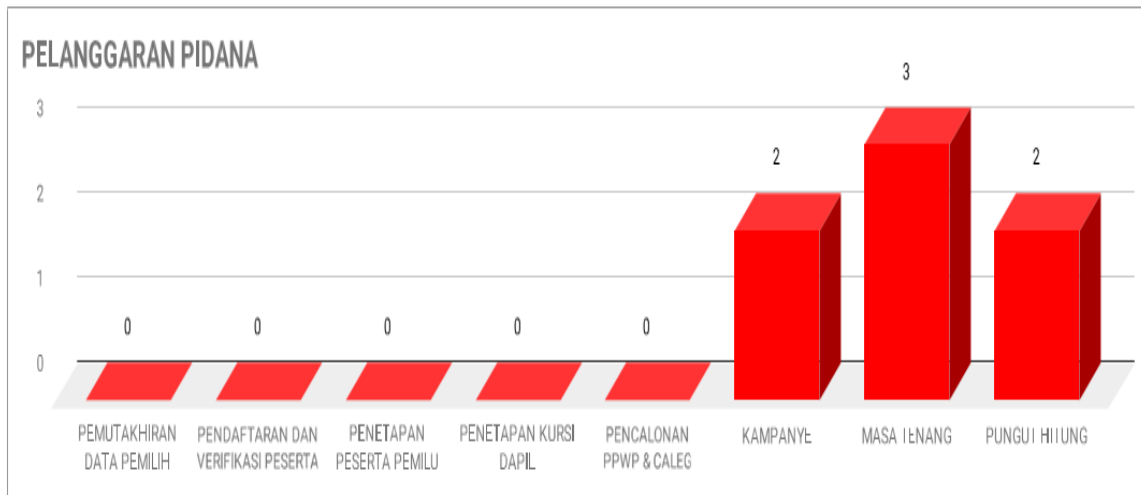
**Diagram 3.1**  
**Pelanggaran Administrasi Tahun 2019**



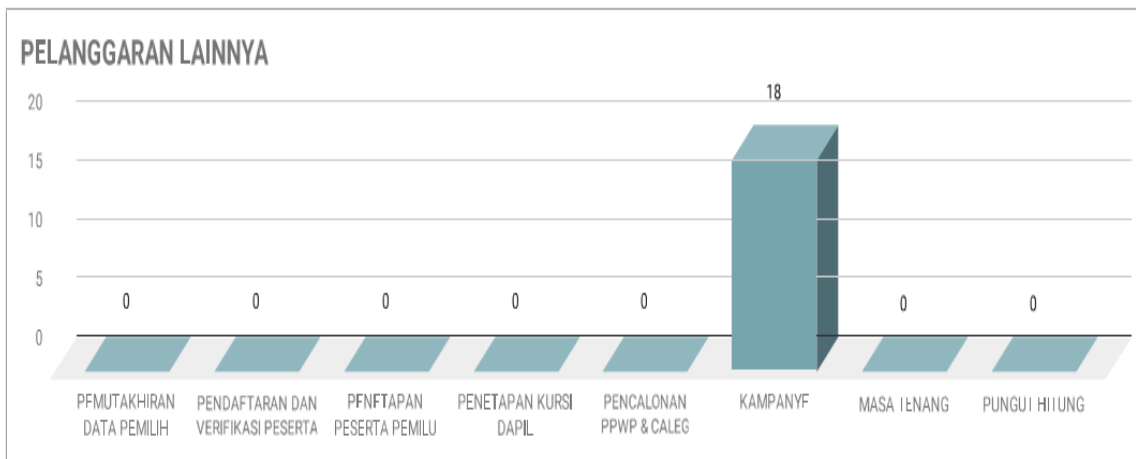
**Diagram 3.2**  
**Pelanggaran Etik Tahun 2019**



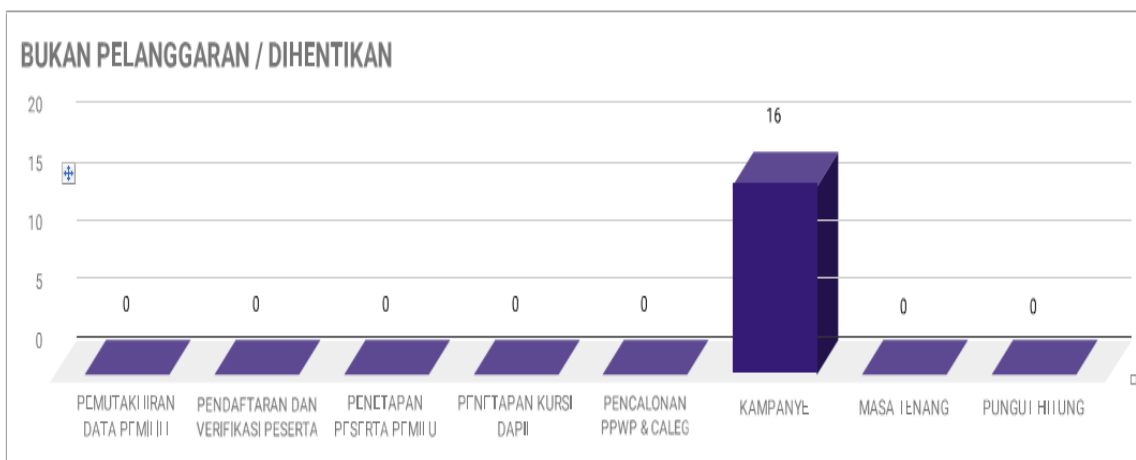
**Diagram 3.3**  
**Pelanggaran Pidana Tahun 2019**



**Diagram 3.4**  
**Pelanggaran Lainnya Tahun 2019**



**Diagram 3.5**  
**Bukan Pelanggaran/Dihentikan Tahun 2019**



|           |   |
|-----------|---|
| Sasaran I | Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu |
|-----------|---|

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sasaran strategis ini memiliki dua indikator utama yaitu (1) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (2) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

Indikator pertama mendeskripsikan bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan para stakeholder dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Indikator kedua mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan aktif dan pasif. Bawaslu diharapkan mampu untuk mengekspektasikan potensi pelanggaran yang akan muncul pada persiapan penyelenggaraan Pilkada sampai dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

#### **A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu Serentak**

Pemangku kepentingan (*Stakeholder*) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu serentak, pemantau Pemilu serentak, partai politik, peserta Pemilu serentak, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu serentak. Semakin tinggi keterlibatan stakeholder maka kualitas pencegahan pelanggaran semakin meningkat. Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah stakeholder tahun ini dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%.

**Tabel 3.3**  
**DATA STAKEHOLDER TAHUN 2019**

| NO | NAMA                              | BIDANG KERJASAMA                   | JENIS INSTANSI    |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1  | KPU Provinsi                      | penyelenggara pemilu               | VERTIKAL          |
| 2  | Pemerintah Daerah                 | peserta sosialisasi                | PEMDA             |
| 3  | Polda dan Polresta                | penegakan ketertiban pemilu        | VERTIKAL          |
| 4  | Kejaksaan Tinggi Kaltim           | penegakan ketertiban pemilu        | VERTIKAL          |
| 5  | Kesbangpol Provinsi               | peserta sosialisasi                | PEMDA             |
| 6  | DPRD Provinsi                     | peserta pemilu                     | PEMDA             |
| 7  | BADKO HMI Kaltara                 | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 8  | BADKO KOHATI KaltimTara           | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 9  | KAMMI Kaltim                      | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 10 | GP Anshor Kaltim                  | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 11 | PMII KaltimTara                   | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 12 | IPNU Kaltim                       | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 13 | Kaltim Post                       | Media Kerjasama                    | Media Cetak       |
| 14 | Koran Kaltim                      | Media Kerjasama                    | Media Cetak       |
| 15 | Tribun Kaltim                     | Media Kerjasama                    | Media Cetak       |
| 16 | Sapost                            | Media Kerjasama                    | Media Cetak       |
| 17 | RRI                               | Media Kerjasama                    | Media Radio       |
| 18 | UMKT Kaltim                       | Peserta Sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 19 | Universitas Mulawarman            | peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 20 | Widyagama                         | Peserta sosialisasi & Promotor     | Perguruan Tinggi  |
| 21 | IAIN                              | Peserta Sosialisasi & Partisipatif | Perguruan Tinggi  |
| 22 | UNTAG                             | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 23 | Univ Balikpapan                   | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 24 | Rektor Universitas Nahdatul Ulama | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 25 | Klinik Pemilu Unmul               | Peserta sosialisasi                | UKM Universitas   |
| 26 | LBH Ansor                         | Peserta Sosialisasi                | LSM               |
| 27 | POLNES                            | Peserta Sosialisasi                | Perguruan Tinggi  |
| 28 | Satpol PP                         | peserta sosialisasi                | LSM               |
| 29 | Fakultas Hukum Unmul              | Penyelenggara Sosialisasi          | FAK. Universitas  |
| 30 | PTUN                              | Narsum sosialisasi                 | Lembaga Peradilan |
| 31 | Pengadilan Tinggi                 | Narsum sosialisasi                 | Lembaga Peradilan |
| 32 | KIPP                              | Narsum sosialisasi                 | LSM               |
| 33 | BINDA                             | penegakan ketertiban pemilu        | Lembaga Negara    |
| 34 | Komisi Informasi Publik (KIP)     | peserta sosialisasi                | VERTIKAL          |
| 35 | STV                               | Media Kerjasama                    | Media Siaran      |
| 36 | TVRI                              | Media Kerjasama                    | Media Siaran      |

**Tabel 3.4**  
**DATA STAKEHOLDER TAHUN 2018**

| NO | NAMA                              | BIDANG KERJASAMA                   | JENIS INSTANSI   |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | KPU Provinsi                      | penyelenggara pemilu               | VERTIKAL         |
| 2  | Pemerintah Daerah                 | peserta sosialisasi                | PEMDA            |
| 3  | Polda dan Polresta                | penegakan ketertiban pemilu        | VERTIKAL         |
| 4  | Kejaksaan Tinggi Kaltim           | penegakan ketertiban pemilu        | VERTIKAL         |
| 5  | Kesbangpol Provinsi               | peserta sosialisasi                | PEMDA            |
| 6  | DPRD Provinsi                     | peserta pemilu                     | PEMDA            |
| 7  | BADKO HMI Kaltara                 | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 8  | BADKO KOHATI KaltimTara           | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 9  | KNPI Kaltim                       | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 10 | KAMMI Kaltim                      | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 11 | GP Anshor Kaltim                  | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 12 | PMII KaltimTara                   | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 13 | Fatayat NU Kaltim                 | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 14 | IPNU Kaltim                       | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 15 | PW Nasyyatul Aisyah Kaltim        | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 16 | Pemuda Muhammadiyah Kaltim        | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 17 | IMM Kaltim                        | peserta sosialisasi                | LSM              |
| 18 | Kaltim Post                       | Media Kerjasama                    | Media Cetak      |
| 19 | RRI                               | Media Kerjasama                    | Media Radio      |
| 20 | UMKT Kaltim                       | Peserta Sosialisasi                | Perguruan Tinggi |
| 21 | Universitas Mulawarman            | peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi |
| 22 | Widyagama                         | Peserta sosialisasi & Promotor     | Perguruan Tinggi |
| 23 | IAIN                              | Peserta Sosialisasi & Partisipatif | Perguruan Tinggi |
| 24 | UNTAG                             | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi |
| 25 | Univ Balikpapan                   | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi |
| 26 | Rektor Universitas Nahdatul Ulama | Peserta sosialisasi                | Perguruan Tinggi |
| 27 | Klinik Pemilu Unmul               | Peserta sosialisasi                | UKM Universitas  |
| 28 | LBH Ansor                         | Peserta Sosialisasi                | LSM              |
| 29 | Fakultas Hukum Unmul              | Penyelenggara Sosialisasi          | FAK. Universitas |
| 30 | Kodam Mulawarman                  | peserta sosialisasi                | VERTIKAL         |

Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang dianggap efektif dan efisien dalam pengawasan Pilkada.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Peningkatan Jumlah} \quad \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2018}}{\sum \text{Stakeholder 2019}} \times 100\% \\ & \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} \\ & \text{Pengawasan Pilkada} \\ & = \frac{38 - 30}{38} \times 100\% = 21\% \text{ (Kenaikan)} \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:

- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- *Focus Group Discussion*(FGD);
- Hibauan;
- Diskusi dengan warga;
- Penyebaran brosur.



Tabel 3.5

**Data Kegiatan Pengawasan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota  
Presiden dan Wakil Presiden 2019 Kaltim**

| NO  | JENIS KEGIATAN   | TEMA  | WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT                                 | PESERTA  | NARASUMBER  |
|-----|------------------|---|-------------------|--|--|---|
| 1.  | Rapat Koordinasi | Pengawasan Kampanye Rapat Umum, Media Cetak dan Media Elektronik Pada Pemilu Tahun 2019   | 16-18 Feb 19      | Swissbel Hotel Samarinda               | Bawaslu Kab/Kota   | Pimpinan Bawaslu Kaltim   |
| 2.  | Sosialisasi      | Mengawal Pemilu 2019, Menciptakan Demokrasi yang berintegritas  | 27-Feb-19         | The Force Caffe                        | Cipayung   | Hari Dermanto<br>Galeh Akbar Tanjung  |
| 3.  | Sosialisasi      | Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemuda Lintas Iman”  | 1 Maret 2019      | Universitas Widyagama                  | Organisasi Kepemudaan Lintas Agama                                       | Galeh Akbar Tanjung<br>Hari Dermanto<br>Herdiansyah Hamzah, SH. LLM         |
| 4.  | Sosialisasi      | Pengawasan Partisipatif Peran Pemilih Millennial Dalam Mensukseskan Pemilu 2019   | 7 Maret 2019      | Universitas Mulawarman                 | Klinik Pemilu FH Unmul   | Galeh Akbar Tanjung, S.Sos<br>Hari Dermanto, S.H., M.H                      |
| 5.  | RDK              | Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 13 Maret          | Kantor                                 | Staf Sekretariat   | 1. Rudiansyah, SE (Ketua KPU Kaltim )<br>2. Veri (Media Massa)              |
| 6.  | Sosialisasi      | Pengawasan Partisipatif "Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change dalam mensukseskan pemilu tahun 2019 yang damai dan berkeadilan        | 20 Maret 2019     | Univ. Widyagama                        | Bem Univ Widyagama   | 1. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos<br>2. Hari Dermanto, S.H., M.H                |
| 7.  | Sosialisasi      | Deklarasi Desa Pelopor Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax di Desa Loa Duri Ilir di Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara     | 29 Maret 2019     | Desa Loa Duri Kukar                    | Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Pemuda Desa, PKK, Mahasiswa, Klinik Pemilu | Pimpinan Bawaslu Kaltim   |
| 8.  | Sosialisasi      | Pengawasan Partisiapatif "Mewujudkan Desa Pelopor Tolak Politik uang, dan Hoax"   | 30 Maret 2019     | Loa Duri Kukar                         | Masyarakat Setempat  | Pimpinan Bawaslu Kaltim   |
| 9.  | Rapat Koordinasi | Persiapan Pengawasan Pungut Hitung Pada Pemilu Tahun 2019   | 10-12 April 2019  | Senyuir Hotel Balikpapan               | Bawaslu Kab/Kota   | Pimpinan Bawaslu Kaltim   |
| 10. | Rapat Koordinasi | Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019   | 9-11 Mei 2019     | Swissbel Hotel Samarinda               | Bawaslu Kab/Kota   | Pimpinan Bawaslu Kaltim   |
| 11. | Sosialisasi      | Sosialisasi dan Diskusi Publik Menguatkan Peran Civi Society dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota | 29 Okt 2019       | Ruang Serba Guna Fisip Univ.Mulawarman | Mahasiswa, Dosen dan Birokrat Kampus                                     | Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Kaltim dan Dekan Fisipol serta Akademisi Unmul |
| 12. | Bimtek           | Kehumasan   | 29-31 Okt 2019    | Hotel Selyca Samarinda                 | Bawaslu Kab/Kota   | Bawaslu RI,Pimpinan Bawaslu Kaltim, dan Media                               |
| 13. | Sosialisasi      | Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu   | 11 Des 2019       | Ruang Arbitase Hukum Unmul             | Mahasiswa dan Dosen  | Najidah, dan Hari Dermanto  |

## B. Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pilkada bertujuan untuk mengukur outcome dari pengawasankhususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dengan demikian semakin kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif.

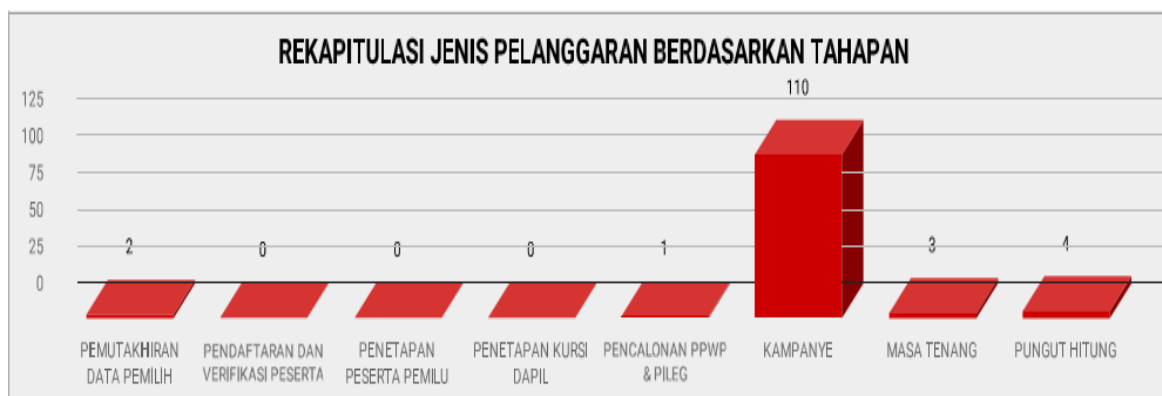
Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

### REKAPITULASI JENIS PELANGGARAN BERDASARKAN TAHAPAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO        | JENIS TAHAPAN                      | JUMLAH PELANGGARAN |
|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 1         | PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH          | 2                  |
| 2         | PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA | 0                  |
| 3         | PENETAPAN PESERTA PEMILU           | 0                  |
| 4         | PENETAPAN KURSI DAPIL              | 0                  |
| 5         | PENCALONAN PPWP & PILEG            | 1                  |
| 6         | KAMPANYE                           | 110                |
| 7         | MASA TENANG                        | 3                  |
| 8         | PUNGUT HITUNG                      | 4                  |
| JML TOTAL |                                    | 120                |

Diagram 3.6  
Rekapitulasi Jenis Pelanggaran berdasarkan Tahapan pada Tahun 2019



Pelaksanaan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 Terdapat 10 kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu serentak:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Menurunnya Jumlah} & \quad \frac{\sum \text{Pelanggaran 2019} - \sum \text{Pelanggaran 2018}}{\sum \text{Pelanggaran 2019}} \times 100\% \\ \text{Pelanggaran Pilkada} & \quad = \\ = \frac{120 - 115}{120} \times 100\% & \quad = 4\% \text{ (penurunan)} \end{aligned}$$

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 perlu lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
2. Akademik Pengawas Pemula
3. Sosialisasi Pemilu Partisipatif

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama kepada stakeholder Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
  - Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif dari Stakeholder pemilihan untuk mengawal Pemilu demokratis.
  - Memberikan informasi kepada stakeholder pemilihan terkait regulasi Pemilu dan pengawasan Pdalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019.
4. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bawaslu sebagai penanggung jawab dalam Pengawasan Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu RI. Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal ini Panwaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

5. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.  
Kegiatan ini bertujuan untuk data Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019 dari masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahannya.
6. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan Pemilihan
7. Proses Rekrutmen Pengawas Pemilu yang ditingkatkan Persyaratannya.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Sasaran II</b> | <b>Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pilkada</b> |
|-------------------|---|

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas tersebut harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran.

Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu maupun pelanggaran administrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Pencapaian atas sasaran II diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

**A. Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kab/Kota dan ditindaklanjuti oleh pihak ekstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan).Semakintinggi rekomendasi Panwaslu Kab/Kota yang ditindaklanjuti maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Pawnaslu Kab/Kota.Cara menghitung capaian indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

**Tabel 3.7**

**REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2019**

| Pelanggaran yang Direkomendasi Tahun 2019 |        | Ditindaklanjuti |        |
|---|--------|-----------------|--------|
| Keterangan                                | Jumlah | Keterangan      | Jumlah |
| Administrasi                              | 84     | Administrasi    | 84     |
| Pidana                                    | 6      | Pidana          | 6      |
| Kode Etik                                 | 6      | Kode Etik       | 6      |
| Lainnya                                   | 19     | Lainnya         | 18     |
| Jumlah Total                              | 115    | Jumlah Total    | 114    |
| <i>Realisasi</i>                          |        |                 | 99 %   |

Persentase realisasi rekomendasi Panwaslu Kab/Kota yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang (KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 23%. Berikut ini persentase rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang pada tahun 2013, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**PERSENTASE REKOMENDASI PELANGGARAN TAHUN 2015 DAN 2018**

| Uraian   | Pelanggaran |      |
|--|-------------|------|
|  | 2018        | 2019 |
| Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang | 48          | 114  |
| Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu                              | 98          | 115  |
| Realisasi  | 51%         | 99%  |

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tahun 2019 sebesar 99%, dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 51%.

$$\text{Persentase Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada} = \frac{\sum \text{Rekomendasi 2019} - \sum \text{Rekomendasi 2018}}{\sum \text{Rekomendasi 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{114 - 48}{48} \times 100\% = 42\%$$

Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Bawaslu Provinsi selama ini hanya lembaga yang bersifat *declaratoir* sehingga dirasa kurang terhadap kewenangannya sehingga legislator perlu merancang sebuah aturan yang membuat Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang bersifat eksekutorial yang dapat menjatuhkan sanksi tanpa perlu diteruskan kepada lembaga lainnya.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;
2. Penyusunan Materi Penanganan Pelanggaran;
3. Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
4. Penyusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

#### **B. Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.

**Tabel 3.9**

#### **LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN**

| <b>Jumlah Pelanggaran yang ditangani</b> | <b>Jumlah Pelanggaran yang Diterima</b> | <b>Realisasi</b> |
|--|---|------------------|
| 159 Pelanggaran                          | 115 Pelanggaran                         | 72%              |

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 72% disebabkan Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU No. 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pilkada. Rincian jumlah pelanggaran Pilkada tahun 2015 dan 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**PELANGGARAN PILKADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

| No                       | Panwas<br>Prov,Kabupaten/Kota | Total Pelanggaran |      |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|------|
|                          |                               | 2018              | 2019 |
| 1                        | Provinsi Kalimantan Timur     | 2                 | 2    |
| 2                        | Balikpapan                    | 11                | 4    |
| 3                        | Berau                         | 3                 | 6    |
| 4                        | Bontang                       | 6                 | 4    |
| 5                        | Kubar                         | -                 | 6    |
| 6                        | Kukar                         | 4                 | 14   |
| 7                        | Kutim                         | 8                 | 31   |
| 8                        | Mahulu                        | -                 | 7    |
| 9                        | Paser                         | 4                 | 17   |
| 10                       | Penajam Paser Utara           | 5                 | 8    |
| 11                       | Samarinda                     | 3                 | 18   |
| Jumlah Total Keseluruhan |                               | 48                | 117  |

$$\begin{aligned} \text{Persentase Jumlah Layanan} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran 2019} - \sum \text{Pelanggaran 2018}}{\sum \text{Pelanggaran 2018}} \times 100\% \\ \text{Pelanggaran Pilkada} &= \frac{117 - 48}{48} \times 100\% = 41\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Pembinaan Sentra Gakkumdu

Sasaran dan tujuan dari pembinaan Sentra Gakkumdu adalah merumuskan pedoman dalam rangka menyamakan pola pikir dan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan baik di tingkat pusat dan daerah dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada dan penanganan tindak pidana Pemilu Serentak DPR, DPD, DPRD Prov. DPRD Kab/Kota Presiden dan Wakil Presiden 2019.

## 2. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

### **Sasaran III    Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada**

Pelayanan atas penyelesaian sengketa Pilkada yang baik idealnya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan dengan tahapan 1) penerimaan dan pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun pemilihan umum.

Penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk mencapai sasaran ini yaitu (1) Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa, dan (2) Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik.

**Tabel 3.11**

#### **PERSENTASE PENYELESAIAN SENKETA PILKADA**

| Indikator Kinerja                                  | Kinerja |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|
|  | Target  | Realisasi | % Capaian |
| Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa     | 100%    | 100%      | 100%      |
| Persentase layanan penyelesaian sengketa yang baik | 100%    | 100%      | 100%      |

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

#### **A. Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142*”.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu.

**Tabel 3.12**

**DATA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA**

| Uraian   | 2018 | 2019 | Realisasi |
|--|------|------|-----------|
| Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Ditangani        | 17   | 18   | 100%      |
| Jumlah Penyelesaian Sengketa yang Diterima Bawaslu | 17   | 18   | 100%      |

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa sebesar 51%. Rincian penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Provinsi tahun 2018 dan Panwas Kabupaten/Kota tahun 2019.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Meningkatnya Jumlah } \frac{\sum \text{Sengketa 2019} - \sum \text{Sengketa 2018}}{\sum \text{Sengketa 2018}} \times 100\% \\ & \text{Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa} = \\ & = \frac{18 - 17}{17} \times 100\% = 94\% \end{aligned}$$

**Tabel 3.13****DATA RINCIAN PENYELESAIAN SENGGKETA PILKADA**

| No                       | Bawaslu Prov, Panwas<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sengketa |      |
|--------------------------|--|-----------------|------|
|                          |  | 2018            | 2019 |
| 1                        | Provinsi Kalimantan Timur              | 17              | 11   |
| 2                        | Balikpapan                             | -               | 3    |
| 3                        | Berau                                  | -               | -    |
| 4                        | Bontang                                | -               | 2    |
| 5                        | Kubar                                  | -               | -    |
| 6                        | Kukar                                  | -               | 1    |
| 7                        | Kutim                                  | -               | -    |
| 8                        | Mahulu                                 | -               | -    |
| 9                        | Paser                                  | -               | -    |
| 10                       | Penajam Paser Utara                    | -               | -    |
| 11                       | Samarinda                              | -               | 1    |
| Jumlah Total Keseluruhan |  | 17              | 18   |

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

- Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Penyusunan Materi Penyelesaian Sengketa Pilkada dan *Standard Operational Procedure* (SOP) Penyelesaian Sengketa Pilkada.
- Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pilkada.

**B. Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik**

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Jumlah responden sebanyak 100 responden yang berasal dari Kab/Kota yang memiliki sengketa. Tingkat kepuasan responden terhadap penyelesaian sengketa sebesar 90,14%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2018 yaitu sebesar 100%, maka realisasi kinerja pada tahun 2018 telah mendekati target 100% dan pada 2019 telah 100%.

Persentase Jumlah Penyelesaian Sengketa Yang Ditangani dengan Baik =  $\frac{\sum \text{Kepuasan Responden 2019} - \sum \text{Kepuasan Responden 2018}}{\sum \text{Kepuasan Responden 2018}} \times 100\%$

$$= \frac{100 - 90,14}{90,14} \times 100\% = 90\%$$

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaian Sengketa.

### 3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2019 realisasi keuangan untuk APBN murni ditargetkan mencapai 100%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan mencapai 79%

**Tabel 3.14**

**DATA PENYERAPAN DIPA APBN TA. 2019**

| Keterangan                         | Target | Alokasi         | Realisasi       | %Capaian |
|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|----------|
| Persentase Penyerapan DIPA TA 2019 | 100%   | 135,915,924,000 | 107,324,022,953 | 79%      |

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

## DATA REALISASI KEUANGAN APBN TA. 2019

RAB BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TA.2019

| KODE         | KOMPONEN INPUT  | OUTPUT KEGIATAN |           |             | KEUANGAN        |                 |             |
|--------------|---|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|              | PROGRAM PENGAWASAN PENYENGGARAAN PEMILU   | TARGET          | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN        | REALISASI       | CAPAIAN (%) |
| 5245         | TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KAB/KOTA       | 100.00          | 78.96     | 78.96       | 135,915,924,000 | 107,324,022,953 | 78.96       |
| 5245.001     | Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota                                  | 100.00          | 66.02     | 66.02       | 6,375,721,000   | 4,209,342,421   | 66.02       |
| 5245.001.001 | Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi   | 18.80           | 14.34     | 76.31       | 1,271,121,000   | 969,999,271     | 76.31       |
| 111          | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran   | 5.63            | 3.81      | 67.63       | 354,207,000     | 239,557,321     | 67.63       |
| 112          | Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN                                   | 4.05            | 3.67      | 90.53       | 344,088,000     | 311,515,800     | 90.53       |
| 113          | Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan   | 0.33            | 0.14      | 41.00       | 20,856,000      | 8,552,000       | 41.00       |
| 114          | Peliputan, Dokumentasi dan Pengelola Media Informasi                                      | 1.33            | 0.86      | 64.82       | 83,520,000      | 54,140,000      | 64.82       |
| 115          | Konsumsi Perkantoran  | 3.84            | 3.76      | 97.87       | 241,200,000     | 236,050,670     | 97.87       |
| 116          | Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan  | 0.64            | 0.22      | 34.94       | 40,200,000      | 14,045,000      | 34.94       |
| 117          | Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja  | 0.89            | 0.67      | 75.15       | 56,250,000      | 42,273,480      | 75.15       |
| 118          | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program   | 2.08            | 1.02      | 48.83       | 130,800,000     | 63,865,000      | 48.83       |
| 5245.001.002 | Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota   | 81.20           | 51.53     | 63.46       | 5,104,600,000   | 3,239,343,150   | 63.46       |
| 111          | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran   | 1.53            | 0.39      | 25.51       | 96,480,000      | 24,616,000      | 25.51       |
| 112          | Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN                                   | 25.27           | 15.15     | 59.96       | 1,588,440,000   | 952,447,900     | 59.96       |
| 113          | Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan   | 3.32            | 0.86      | 25.77       | 208,560,000     | 53,755,000      | 25.77       |
| 114          | Peliputan, Dokumentasi dan Pengelola Media Informasi                                      | 11.10           | 4.60      | 41.42       | 697,920,000     | 289,098,200     | 41.42       |
| 115          | Konsumsi Perkantoran  | 18.90           | 16.46     | 87.12       | 1,188,000,000   | 1,034,937,000   | 87.12       |
| 116          | Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan  | 4.70            | 2.77      | 58.89       | 295,200,000     | 173,855,500     | 58.89       |
| 117          | Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja  | 3.51            | 0.71      | 20.13       | 220,400,000     | 44,371,800      | 20.13       |
| 118          | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program   | 12.88           | 10.60     | 82.30       | 809,600,000     | 666,261,750     | 82.30       |
| 5245.002     | Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota                  | 100.00          | 82.96     | 82.96       | 11,317,995,000  | 9,389,645,145   | 82.96       |
| 5245.002.001 | Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi                                 | 11.84           | 11.29     | 95.36       | 2,445,495,000   | 2,332,037,149   | 95.36       |
| 111          | Pengawasan Pemilu Partisipatif  | 0.88            | 0.85      | 96.84       | 100,690,000     | 97,509,200      | 96.84       |
| 112          | Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan            | 0.07            | 0.07      | 92.54       | 8,040,000       | 7,440,000       | 92.54       |
| 113          | Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan  | 0.20            | 0.05      | 24.13       | 22,816,000      | 5,505,000       | 24.13       |
| 114          | Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu | 0.70            | 0.54      | 77.04       | 16,080,000      | 12,387,500      | 77.04       |
| 115          | Fasilitasi Sentra Gakkumdu  | 0.77            | 0.76      | 98.58       | 88,400,000      | 87,147,100      | 98.58       |
| 116          | Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu  | 1.16            | -         | -           | 29,307,000      | -               | -           |
| 117          | Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi                                     | 6.45            | 6.35      | 98.54       | 1,930,824,000   | 1,902,685,199   | 98.54       |
| 118          | Evaluasi Pengawasan Pemilu  | 1.35            | 1.03      | 76.26       | 89,500,000      | 68,250,000      | 76.26       |
| 119          | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum  | 0.27            | 0.25      | 94.54       | 159,838,000     | 151,113,150     | 94.54       |
| 5245.002.002 | Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota                           | 88.16           | 70.12     | 79.54       | 8,872,500,000   | 7,057,607,996   | 79.54       |
| 111          | Pengawasan Pemilu Partisipatif  | 1.41            | 0.45      | 31.72       | 160,800,000     | 51,001,000      | 31.72       |
| 112          | Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan            | 1.41            | 0.54      | 38.48       | 160,800,000     | 61,873,000      | 38.48       |
| 113          | Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan  | 2.00            | 0.40      | 20.15       | 228,160,000     | 45,973,300      | 20.15       |
| 114          | Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu | 8.79            | 0.45      | 5.14        | 603,200,000     | 30,980,000      | 5.14        |
| 115          | Fasilitasi Sentra Gakkumdu  | 1.11            | 0.33      | 29.83       | 126,800,000     | 37,827,500      | 29.83       |
| 116          | Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu  | 7.94            | -         | -           | 50,000,000      | -               | -           |
| 117          | Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi                                     | 57.86           | 53.36     | 92.21       | 6,671,940,000   | 6,152,471,796   | 92.21       |
| 118          | Evaluasi Pengawasan Pemilu  | 7.63            | 5.94      | 77.80       | 870,800,000     | 677,481,400     | 77.80       |

|                     |   |               |              |              |                       |                       |              |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>5245.003</b>     | <b>Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu</b>    | <b>100.00</b> | <b>79.28</b> | <b>79.28</b> | <b>24,620,297,000</b> | <b>19,519,564,433</b> | <b>79.28</b> |
| <b>5245.003.001</b> | <b>Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu</b>                       | <b>33.34</b>  | <b>27.15</b> | <b>81.45</b> | <b>8,949,973,000</b>  | <b>7,289,318,869</b>  | <b>81.45</b> |
| 111                 | Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres                                      | 4.37          | 4.33         | 99.18        | 2,807,120,000         | 2,784,109,187         | 99.18        |
| 112                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia   | 2.56          | 2.15         | 83.79        | 771,416,000           | 646,393,571           | 83.79        |
| 113                 | Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota  | 3.26          | 3.14         | 96.26        | 620,500,000           | 597,277,253           | 96.26        |
| 114                 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu   | 1.05          | 0.97         | 92.22        | 485,616,000           | 447,846,425           | 92.22        |
| 115                 | Teknis Pengawasan Pemilu  | 1.06          | 1.05         | 98.74        | 202,000,000           | 199,445,000           | 98.74        |
| 116                 | Penyelesaian Sengketa   | 1.34          | 1.19         | 89.14        | 263,000,000           | 234,439,586           | 89.14        |
| 117                 | Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran   | 5.80          | 5.39         | 92.85        | 987,750,000           | 917,154,030           | 92.85        |
| 118                 | Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu   | 0.61          | 0.57         | 93.62        | 115,560,000           | 108,185,293           | 93.62        |
| 119                 | Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu  | 13.28         | 6.67         | 50.22        | 2,697,011,000         | 1,354,468,524         | 50.22        |
| <b>5245.003.002</b> | <b>Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu</b>                 | <b>66.66</b>  | <b>52.03</b> | <b>78.05</b> | <b>15,670,324,000</b> | <b>12,230,245,564</b> | <b>78.05</b> |
| 111                 | Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres                                      | 0.13          | 0.12         | 93.34        | 3,395,270,000         | 3,169,011,947         | 93.34        |
| 112                 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia   | 7.34          | 6.00         | 81.84        | 2,371,581,000         | 1,940,804,100         | 81.84        |
| 113                 | Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota  | 4.36          | 3.52         | 80.69        | 830,560,000           | 670,200,150           | 80.69        |
| 114                 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu   | 2.71          | 2.62         | 96.77        | 764,800,000           | 740,073,150           | 96.77        |
| 115                 | Teknis Pengawasan Pemilu  | 7.05          | 6.24         | 88.47        | 1,342,400,000         | 1,187,662,950         | 88.47        |
| 116                 | Penyelesaian Sengketa   | 6.10          | 4.41         | 72.26        | 1,035,920,000         | 748,603,200           | 72.26        |
| 117                 | Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran   | 32.65         | 24.39        | 74.71        | 4,629,588,000         | 3,458,708,067         | 74.71        |
| 118                 | Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu   | 0.38          | 0.19         | 48.42        | 72,800,000            | 35,250,000            | 48.42        |
| 119                 | Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu  | 5.94          | 1.36         | 22.81        | 1,227,405,000         | 279,932,000           | 22.81        |
| <b>5245.004</b>     | <b>Layanan Teknis dan administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc</b>             | <b>100.00</b> | <b>91.97</b> | <b>91.97</b> | <b>44,885,839,000</b> | <b>41,281,173,409</b> | <b>91.97</b> |
| <b>5245.004.001</b> | <b>Kecamatan</b>  | <b>73.10</b>  | <b>65.46</b> | <b>89.55</b> | <b>30,375,639,000</b> | <b>27,201,378,409</b> | <b>89.55</b> |
| 111                 | Honorarium  | 0.44          | 0.43         | 96.39        | 275,010,000           | 265,090,000           | 96.39        |
| 112                 | Sewa Gedung/ Meubelair/Peralatan/Kendaraan  | 13.30         | 11.98        | 90.09        | 5,603,700,000         | 5,048,550,900         | 90.09        |
| 113                 | Pemeliharaan Gedung/Meubelair/Peralatan/Kendaraan   | 0.12          | 0.05         | 38.95        | 52,723,000            | 20,534,750            | 38.95        |
| 114                 | Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 8.29          | 6.52         | 78.59        | 4,580,180,000         | 3,599,725,159         | 78.59        |
| 115                 | Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang Kode Etik | 22.55         | 19.37        | 85.89        | 8,928,000,000         | 7,668,123,000         | 85.89        |
| 116                 | Pelatihan/Bimtek Pengawasan Pemilu  | 17.59         | 17.20        | 97.79        | 8,516,536,000         | 8,328,239,600         | 97.79        |
| 117                 | Pelatihan Saksi Parpol  | 10.81         | 10.14        | 93.87        | 2,419,490,000         | 2,271,115,000         | 93.87        |
| <b>5245.004.002</b> | <b>Desa/Kelurahan</b>   | <b>13.26</b>  | <b>12.45</b> | <b>93.86</b> | <b>6,876,750,000</b>  | <b>6,454,195,000</b>  | <b>93.86</b> |
| 111                 | Honorarium  | 9.01          | 9.00         | 99.87        | 4,671,000,000         | 4,664,700,000         | 99.87        |
| 112                 | Operational   | 4.25          | 3.45         | 81.13        | 2,205,750,000         | 1,789,495,000         | 81.13        |
| <b>5245.004.003</b> | <b>TPS</b>  | <b>13.64</b>  | <b>13.63</b> | <b>99.90</b> | <b>7,633,450,000</b>  | <b>7,625,600,000</b>  | <b>99.90</b> |
| 111                 | Honorarium  | 11.54         | 11.53        | 99.93        | 5,997,750,000         | 5,993,350,000         | 99.93        |
| 112                 | Operational   | 2.10          | 2.09         | 99.79        | 1,635,700,000         | 1,632,250,000         | 99.79        |

|              |   |        |         |         |                |                |         |
|--------------|---|--------|---------|---------|----------------|----------------|---------|
| 5245.010     | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak                         | 100.00 | 75.85   | 75.85   | 1,448,604,000  | 1,098,706,430  | 75.85   |
| 5245.010.000 | Sub Output  | 3.22   | #DIV/0! | #DIV/0! | -              | -              | #DIV/0! |
| 000          | Komponen  | 3.22   | #DIV/0! | #DIV/0! | -              | -              | #DIV/0! |
| 5245.010.002 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota - 1      | 15.38  | 7.63    | 49.62   | 144,606,000    | 71,753,700     | 49.62   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.75   | 3.22    | 55.93   | 32,640,000     | 18,256,900     | 55.93   |
| 070          | Koordinasi dengan Stakeholder                               | 5.02   | 5.02    | 100.00  | 21,450,000     | 21,450,000     | 100.00  |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 1.63    | 35.40   | 90,516,000     | 32,046,800     | 35.40   |
| 5245.010.003 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2      | 9.36   | 6.57    | 70.24   | 150,057,000    | 105,397,500    | 70.24   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 4.75   | 4.14    | 87.15   | 48,615,000     | 42,367,300     | 87.15   |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 2.86    | 62.13   | 101,442,000    | 63,030,200     | 62.13   |
| 5245.010.004 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3      | 17.54  | 12.78   | 72.87   | 148,462,000    | 108,187,211    | 72.87   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.70   | 4.01    | 70.27   | 38,466,000     | 27,031,539     | 70.27   |
| 060          | Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 2.46   | 2.42    | 98.22   | 2,250,000      | 2,209,900      | 98.22   |
| 064          | Sosialisasi Pengawasan Pemilu                               | 4.77   | 4.59    | 96.14   | 25,900,000     | 24,900,000     | 96.14   |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 3.04    | 66.03   | 81,846,000     | 54,045,772     | 66.03   |
| 5245.010.005 | Laporan Pengawasan Pilkada serentak - Kabupaten/Kota 4      | 10.36  | 10.06   | 97.06   | 272,748,000    | 264,726,944    | 97.06   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.75   | 5.01    | 87.08   | 55,626,000     | 48,437,472     | 87.08   |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 4.59    | 99.62   | 217,122,000    | 216,289,472    | 99.62   |
| 5245.010.006 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5      | 10.36  | 9.37    | 90.49   | 218,385,000    | 197,619,675    | 90.49   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.75   | 3.92    | 68.11   | 35,445,000     | 24,140,999     | 68.11   |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 4.37    | 94.83   | 182,940,000    | 173,478,676    | 94.83   |
| 5245.010.007 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 6      | 23.68  | 10.15   | 42.87   | 283,094,000    | 121,355,600    | 42.87   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.75   | 2.88    | 50.02   | 35,102,000     | 17,558,600     | 50.02   |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 1.93    | 41.85   | 247,992,000    | 103,797,000    | 41.85   |
| 5245.010.008 | Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7      | 13.32  | 13.23   | 99.31   | 231,252,000    | 229,665,800    | 99.31   |
| 055          | Perencanaan Program dan Anggaran                            | 5.75   | 5.66    | 98.47   | 81,736,000     | 80,488,600     | 98.47   |
| 060          | Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | 2.96   | 2.96    | 100.00  | 2,250,000      | 2,250,000      | 100.00  |
| 071          | Perjalanan dinas/Transport dalam rangka konsultasi/undangan | 4.61   | 4.60    | 99.77   | 147,266,000    | 146,927,200    | 99.77   |
| 5245.951     | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                       | 100.00 | 98.43   | 98.43   | 674,600,000    | 664,026,897    | 98.43   |
| 5245.951.001 | Layanan Internal Bawaslu Provinsi                           | 10.32  | 10.32   | 100.00  | 69,600,000     | 69,599,996     | 100.00  |
| 052          | Pengadaan Perangkat Pengolah Data                           | 2.16   | 2.16    | 100.00  | 14,600,000     | 14,600,000     | 100.00  |
| 053          | Pengadaan Peralatan Perkantoran                             | 8.15   | 8.15    | 100.00  | 55,000,000     | 54,999,996     | 100.00  |
| 5245.951.002 | Layanan Internal Bawaslu Kabupaten/Kota                     | 89.68  | 88.12   | 98.25   | 605,000,000    | 594,426,901    | 98.25   |
| 052          | Pengadaan Perangkat Pengolah Data                           | 7.41   | 6.40    | 86.38   | 50,000,000     | 43,187,500     | 86.38   |
| 053          | Pengadaan Peralatan Perkantoran                             | 82.27  | 81.71   | 99.32   | 555,000,000    | 551,239,401    | 99.32   |
| 5245.994     | Layanan Perkantoran   | 100.00 | 66.88   | 66.88   | 46,592,868,000 | 31,161,564,218 | 66.88   |
| 5245.994.001 | Layanan Perkantoran Bawaslu Provinsi                        | 15.30  | 9.59    | 62.65   | 7,117,966,000  | 4,459,136,409  | 62.65   |
| 001          | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan                               | 7.44   | 4.50    | 60.51   | 3,374,227,000  | 2,041,681,792  | 60.51   |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                         | 7.87   | 5.08    | 64.57   | 3,743,739,000  | 2,417,454,617  | 64.57   |
| 5245.994.002 | Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota                  | 84.70  | 57.29   | 67.64   | 39,474,902,000 | 26,702,427,809 | 67.64   |
| 001          | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan                               | 34.49  | 14.29   | 41.43   | 15,650,602,000 | 6,484,636,307  | 41.43   |
| 002          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor                         | 50.20  | 42.60   | 84.86   | 23,824,300,000 | 20,217,791,502 | 84.86   |

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 RENCANA KEDEPAN**

Rencana kedepan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan penguatan di beberapa hal antara lain :

- a. Pelaksanaan komitmen pada sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan pada setiap bentuk pelanggaran Pemilu, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik politik yang akan dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, mobilisasi politik melalui intimidasi, dan politik uang.
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

### **4.2 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian

rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 79.00%

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 telah efektif dan efisien.
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*).



## PERJANJIAN KINERJA

### Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIPUL  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ABHAN  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

ABHAN

Pihak Pertama,

SAIPUL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

| No. | Sasaran Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur | Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019                           | 5      |
|     |  | Persentase Menurunnya Jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019                                   | 10%    |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur                  | Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang Ditindaklanjuti | 100%   |
|     |  | Persentase jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai Ketentuan  | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Timur                   | Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa  | 100%   |
|     |  | Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik   | 100%   |

**Kegiatan**

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

**Anggaran**

Rp134.616.950.000-

Jakarta, Februari 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Ketua,

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Ketua,

  
ABHAN

  
SAIPUL

## PENGUKURAN KINERJA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019

| No                             | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja  | Target                | Realisasi  | %             |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|------------|---------------|
| 1                              | Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu. | Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu  | 5%                    | 8%         | 160%          |
|                                |  | Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu   | 10%                   | 6.5%       | 65%           |
| <b>Rata-rata Capaian</b>       |  |  |                       |            | <b>112.5%</b> |
| 2                              | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu. | Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti      | 100%                  | 100%       | 100%          |
|                                |  | Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan | 100%                  | 6.5%       | 65%           |
| <b>Rata-rata Capaian</b>       |  |  |                       |            | <b>82.5%</b>  |
| 3                              | Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu   | Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa  | 100%                  | 100%       | 100%          |
|                                |  | Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik                             | 100%                  | 100%       | 100%          |
| <b>Rata-rata Capaian</b>       |  |  |                       |            | <b>100%</b>   |
| <b>Total Rata-rata Capaian</b> |  |  |                       |            | <b>98.33%</b> |
| Program                        |  | Anggaran   |                       | %          |               |
|                                |  | Pagu   | Realisasi             |            |               |
| 1                              | Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu            | Rp 135.915.924.000,-   | Rp. 107.324.022.953,- | <b>79%</b> |               |